KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Istana Bantah Jokowi Terganggu
Tanggal : Kamis, 19 September 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Istana Bantah Jokowi Terganggu

DESSY SUCIATI SAPUTRI, RIZKYAN ADIYUDHA

JAKARTA — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) terganggu terhadap kinerja KPK. Menurut Adita, Jokowi justru mengapresiasi kinerja KPK yang selama ini dinilai sudah baik.

"Pendapat Presiden Jokowi soal KPK sudah cukup jelas. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang dinilai sudah baik. Intinya, KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi," ujar Adita saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (18/9).

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai untuk memperkuat KPK. Karena itu, kinerja KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai melalui revisi. "Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain untuk pemberantasan korupsi," kata dia.

Pada Selasa (17/9), Fahri Hamzah menyebut alasan Jokowi menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut karena adanya gangguan terhadap kerja-kerja di pemerintahannya. "Presiden Jokowi merasa KPK sudah membuat gangguan," kata Fahri.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari juga melihat ada keterlibatan Presiden dalam revisi UU KPK tersebut. Pasalnya, DPR tidak akan melanjutkan pembahasan revisi UU KPK jika tidak ada sinyal dari Istana.

"Sinyal dari Istana penting karena sulit bagi mereka bekerja tanpa ada kepastian dan kalau *enggak* ada sinyal dari Istana juga buat apa mengerjakan UU KPK, sementara masa jabatan mereka *dikit* lagi habis," kata dia.

Meski begitu, ia menilai revisi itu tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak sah. Pertama, pembahasan revisi UU KPK cacat prosedural karena tidak dilakukan melalui prolegnas prioritas tahunan. Kedua, pengambilan keputusan meloloskan revisi UU itu tidak memenuhi kuota forum (kuorum). Secara absensi rapat, kehadiran anggota dewan adalah 289 anggota dari total 560 anggota. Namun, ketika dihitung secara manual, jumlah yang hadir hanya 102 anggota dewan.

"Kuorum kemarin juga *enggak* tercapai. Jadi, secara prosepertі itu saja," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordiator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta seluruh elemen masyarakat tidak terlalu curiga terhadap Presiden Jokowi dan DPR. Pengesahan UU KPK, kata dia, tidak boleh dianggap sebagai upaya balas dendam DPR dan bentuk ingkar janji dari Presiden.

"Seakan-akan beliau (Presiden Jokowi) tidak pro pada pemberantasan korupsi dan sebagainya. Itu kita hilangkan dulu. Mari kita coba masuk dalam pemikiran yang konstruktif, pemikiran yang positif, mengapa harus ada revisi UU KPK yang sudah berusia 17 tahun," kata dia di kantornya, kemarin.

Ia menerangkan, UU dibuat karena kondisi objektif dan lebih kepada untuk membangun keteraturan masyarakat. Kondisi saat UU dibentuk dapat berubah pada kemudian hari. "Apakah itu perubahan karena opini publik atau kepentingan masyakat. Ini yang harus kita sadari. Memang, secara alami UU harus mengalami perubahan," kata dia.

Masif

Sementara itu, upaya pelemahan KPK dinilai tidak hanya terjadi di lembaga resmi. Pendiri dan analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi, justru melihat ada pelemahan KPK secara terstruktur, masif, dan sistematis di media sosial (medsos). Sasaran pelemahan KPK gaya ini dinilai untuk memantik keraguan publik terhadap KPK.

"Kita perhatikan, di medsos itu sebenarnya simpel saja. Ketika ada sebuah hal yang ingin dicapai maka publik dibombardir dengan narasi. Dan narasi itu butuh semacam *labelling*," ujar Ismail dalam acara diskusi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemarin.

Selama ini, dia melanjutkan, label yang paling efektif memberikan dampak di medsos adalah soal khilafah dan radikalisme. Ismail mencontohkan narasi yang dikembangkan adalah soal isu Taliban yang ada di KPK. Narasi itu dibangun lewat tulisan, gambar, dan video. Rangkuman informasi ini lantas dibombardir terus-menerus sehingga dampaknya orang yang semula percaya kepada KPK menjadi ragu-ragu.

Strategi selanjutnya, kata Ismail, menyerang tokoh tertentu di KPK. "Narasi ini sangat berpengaruh. Yang berusaha disasar adalah keragu-raguan. Misal, sebelumnya kita punya 100 orang yang percaya sama KPK, dapat 20 persen saja yang ragu gara-gara bombardir